PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2020 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh
Eka Nur Viana
NPM. 1851010074
Program Studi: Ekonomi Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2020 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh
Eka Nur Viana
NPM. 1851010074
Program Studi: Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Madnasir, S.E., M.S.I.
Pembimbing II : Weny Rosilawati, M.M.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan dihitung dari pendapatan domestik regional bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup, tingkat kesehatan serta pendidikan masyarakatnya. IPM Provinsi Lampung tahun 2010-2020 selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, akan tetapi IPM Provinsi Lampung masih dibawah rata-rata IPM Nasional. Selain itu juga, IPM Provinsi Lampung menempati posisi peringkat ke 24 dari 34 Provinsi di Indonesia dan peringkat terakhir di Pulau Sumatera. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kondisi pembangunan manusia di Indonesia masih belum merata di masing-masing provinsi dan capaian IPM Provinsi Lampung masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain terutama di Pulau Sumatera. Melihat pembangunan IPM di Provinsi Lampung tersebut maka perlu adanya langkah-langkah konkrit dan kebijakan-kebijakan khusus berkaitan dengan sektor atau bidang yang dapat memberikan dampak efektif terhadap pembangunan manusia/modal manusia agar kualitas sumber daya manusia dapat terus bertumbuh. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, bidang pendidikan dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2010-2020 dalam perspektif ekonomi islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, bidang pendidikan dan produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2010-2020 dalam perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari publikasi BPS Provinsi Lampung dan DJPK Kemenenkeu yang berupa data runtun waktu *(time series)* dari tahun 2010-2020 mengenai data pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, bidang pendidikan, produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi Eviews10.

Hasil analisis data regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2010-2020. Sedangkan pengeluaran

pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2010-2020. Dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2010-2020. Secara simultan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, bidang pendidikan dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2010-2020. Indeks pembangunan manusia dalam pembahasan Ekonomi Islam dapat dijadikan suatu ukuran untuk melihat kesejahteraan masyarakatnya. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi indikator kesejahteraan adalah tercapainya *falah* dalam segala kegiatan perekonomian. *Falah* mengacu pada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Sehingga tidak hanya kesejahteraan dunia yang mencakup jasadiyah dan ruhaniah saja yang akan didapatkan tetapi juga kebaikan akhirat.

Kata Kunci: ***Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, PDRB, IPM***

ABSTRACT

Human Development is one indicator for the progress of a country. A country is said to be developed not only from gross regional domestic income but also from aspects of life expectancy, level of health and education of its people. The HDI of Lampung Province in 2010-2020 always increases every year, but the Human Development Index of Lampung Province is still below the National HDI average. In addition, the HDI of Lampung Province is ranked 24th out of 34 provinces in Indonesia and the last rank on the island of Sumatra. The above shows that the condition of human development in Indonesia is still not evenly distributed in each province and the HDI achievement of Lampung Province is still lagging behind when compared to other regions, especially on the island of Sumatra. Seeing the HDI development in Lampung Province, it is necessary to take concrete steps and special policies related to sectors or fields that can have an effective impact on human development/human capital so that the quality of human resources can continue to grow. The formulation of the problem in this study is whether government spending on health, education and gross regional domestic product has an effect on the human development index in Lampung Province in 2010-2020 from an Islamic economic perspective. The purpose of this study was to determine the effect of government spending on health, education and gross regional domestic product on the human development index in Lampung Province in 2010-2020 from an Islamic economic perspective.

This research is a type of quantitative research. The type of data used is secondary data obtained from the publications of the Lampung Province BPS and the Ministry of Finance's DJPK in the form of time series data from 2010-2020 regarding data on government expenditures in the health sector, education sector, gross regional domestic product and the provincial human development index. Lampung. The data analysis method used in this research is multiple linear regression data analysis method with the help of the Eviews10 application.

The results of the regression data analysis in this study indicate that partially government spending in the health sector has a significant effect on the human development index in Lampung Province in 2010-2020. Meanwhile, government spending on education has no significant effect on the human development index in Lampung Province in 2010-2020. And the gross regional domestic

product has a significant effect on the human development index in Lampung Province in 2010-2020. Simultaneously, government spending on health, education and gross regional domestic product has an effect on the human development index in Lampung Province in 2010-2020. The human development index in the discussion of Islamic Economics can be used as a measure to see the welfare of its people. In the Islamic economic system, the indicator of welfare is the achievement of falah in all economic activities. Falah refers to the Islamic concept of man himself. So that not only the welfare of the world which includes the body and spirit will be obtained but also the goodness of the hereafter.

Keywords: Government Expenditure, Education, Health, GRDP, HDI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Eka Nur Viana
NPM	: 1851010074
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 dalam Perspektif Ekonomi Islam"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2022
Penulis,

Eka Nur Viana
NPM. 1851010074

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 dalam Perspektif Ekonomi Islam
Nama Mahasiswa	: Eka Nur Viana
NPM	: 1851010074
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyah dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Mei 2022

Pembimbing Akademik I	Pembimbing Akademik II
Dr. Madnasir, S.E., M.Si.	**Weny Rosilawati, M.M.**
NIP. 197504242002121001	**NIP. 198008012003121001**

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.Sy.
NIP. 198208082011022009

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2020 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**, disusun oleh **Eka Nur Viana, NPM: 1851010074,** Program studi Ekonomi Syariah. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Juli 2022.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I (.....)

Sekretaris : Raizky Rienaldy Pramasha, S.E., M.E (.....)

Penguji I : Dr. Hi. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji II : Weny Rosilawati, M.M (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A., Akt
NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Q.S Al-Mujadilah[58]: 11)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untukku dalam menyusun skripsi ini. Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Kismanto dan Ibunda Suyatmi yang senantiasa selalu memberikan semangat, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada henti agar selalu kuat menjalani setiap rintangan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Dian Permana yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan atas perjuanganku menempuh pendidikan.
3. Teman-teman Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 khususnya kelas B Ekonomi Syari'ah semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dan bermartabat bagi kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa dengan pancaran nilai-nilai Rabbani, Aamiin.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan yang menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalin silaturahmi.

RIWAYAT HIDUP

Eka Nur Viana , Dilahirkan di Candimas pada tanggal 09 November 1999, anak pertama dari pasangan Kismanto dan Suyatmi yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan dimulai dari SDN 03 Abung Jayo selesai pada tahun 2012, SMP Negeri 10 Kotabumi selesai pada tahun 2015, SMK Negeri 01 Kotabumi selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 21 April 2022

Yang membuat,

Eka Nur Viana

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis hantarkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat penyelesaikan skripsi dengan judul: "PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2020 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, pada program Strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis merasa perlu untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M,Akt, CA. selaku Dekan Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Madnasir, S.E., M.S.I selaku Pembimbing I dan Ibu Weny Rosilawati, M.M. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, motovasi, dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu penguji yang telah menguji dan memberi masukan terhadap skripsi ini.
5. Para staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membatu kelancaran administrasi kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Staf Akademik dan Pegawai Perpustakaan yang memberikan informasi dan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi bagi penulis.
8. Seluruh sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah 2018 kelas B terkhusus untuk Aina, Anggi, Arum, Ayu, Faizah, Fiola, Ilham, Meti, Nanda, Nita, Rachmainy, Santi, dan Widya terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan telah berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini.
9. Para sahabat kosanku yaitu Amel, Kak Kade, Kak Diah dan Meirda yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar aku cepat lulus, terutama Kak Kade yang selalu jadi mentor terbaikku.
10. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Semoga Allah membalas budi baik kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga para pembaca kiranya dapat memberikan saran-saran yang bersifat membangun guna memperbaiki penelitian ini.

Bandar Lampung,
Penulis

Eka Nur Viana
NPM. 1851010074

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GRAFIK ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 13
D. Rumusan Masalah 13
E. Tujuan Penelitian 14
F. Manfaat Penelitian 14
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 15
H. Sistematika Penulisan 23

BAB II LANDASAN TEORI **27**
A. Teori Yang Digunakan 27
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 27
a. Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 27
b. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 29
c. Pengukuran Pembangunan Manusia (IPM) 31

d. Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... 35
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam 35
2. Pengeluaran Pemerintah 38
a. Definisi Pengeluaran Pemerintah 38
b. Teori Pengeluaran Pemerintah 39
c. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan 40
d. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 43
e. Pengeluaran Pemerintah dan Kebijakan Publik Ditinjau dalam Persepektif Ekonomi Islam 46
f. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 48
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 50
a. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... 50
b. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... 52
c. Indikator Pengukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 53
d. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 55
e. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 58
f. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Perspektif Ekonomi Islam 58
g. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 60
4. Kerangka Berfikir 61
B. Pangajuan Hipotesis 62

BAB III METODE PENELITIAN 67
A. Waktu dan Tempat Penelitian 67
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 67

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 68
D. Definisi Operasional Variabel 70
E. Teknik Analisis Data 73
1. Metode Analisis 73
2. Alat Analisis 73
3. Regresi Linier Berganda 76
4. Uji Hipotesis 76

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 79
A. Deskripsi Objek Penelitian 79
1. Gambaran Umum Provinsi Lampung 79
2. Indeks Pembangunan Manusia 84
3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan 87
4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 89
5. Produk Domestik Regional Bruto 90
B. Analisis Data 92
1. Uji Asumsi Klasik 92
a. Uji Normalitas 92
b. Uji Multikoleniaritas 93
c. Uji Autokorelasi 94
d. Uji Heteroskedastisitas 94
2. Analisis Regresi Linier Berganda 95
3. Uji Hipotesis 98
a. Uji t (Parsial) 98
b. Uji F (Simultan) 99
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 99
C. Pembahasan 99
1. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 99
2. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 101

3. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 104
4. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2020 ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam 106

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 113
A. Simpulan 113
B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional Tahun 2020 4
1.2. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Sumatera Tahun 2020 5
1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional Tahun 2010-2020 6
2.1 Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM ...33
2.2 Peringkat Kinerja Pembangunan Manusia 34
3.1 Definisi Operasional Variabel 71
4.1 Pembagian Wilayah Provinsi Lampung 80
4.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Provinsi Lampung Tahun 2020.....81
4.3 Jumlah Tenaga Pendidik dan Fasilitas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2020 82
4.4 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 83
4.5 Angka Harapan Hidup Penduduk (Tahun) Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 (Metode Baru) 85
4.6 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 (Metode Baru) 85
4.7 Pengeluaran Per Kapita Provinsi Lampung (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Tahun 2010-2020 (Matode Baru) 86
4.8 Indeks Pembangunan Manusia (Rasio) Provinsi Lampung Tahun 2020 87
4.9 Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 (Rupiah) 88
4.10 Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun

2010-2020 (Rupiah) 89
4.11 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2020 (Jutaan Rupiah) 91
4.12 Hasil Uji Multikolinearitas 93
4.13 Hasil Uji Autokorelasi 94
4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas 95
4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 96

DAFTAR GRAFIK

Grafik **Halaman**

1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2020 9
4.1 Hasil Uji Normalitas 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Kerangka Berfikir 61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Analisis Regresi Linier Berganda
Lampiran 2. Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Lampiran 3. Uji Normalitas
Lampiran 4. Uji Multikolinearitas
Lampiran 5. Uji Autokorelasi
Lampiran 6. Uji Heteroskedastisitas
Lampiran 7. Kartu Konsultasi Bimbingan
Lampiran 8. Surat Keterangan Hasil Turnitin

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman penafsiran dikalangan pembaca. Adapun judul skripsi ini adalah **"Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 dalam Perspektif Ekonomi Islam."**

Berikut penjelasan dari beberapa istilah pada judul penelitian ini yaitu:

1. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.[1]
2. **Pengeluaran Pemerintah** merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran.[2]
3. **Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan** merupakan alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang kesehatan.[3]
4. **Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan** merupakan alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang pendidikan.[4]
5. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.[5]

---

[1]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 145.

[2] Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

[3]Badan Pusat Statistik, "Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidkan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial)," 2022, https://www.bps.go.id.

[4] *Ibid*.

6. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan rill perkapita yang disesuaikan.[6]
7. **Perspektif** adalah suatu kumpulan at au asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal.[7]
8. **Ekonomi Islam** adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami nilai-nilai Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.[8]

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup, tingkat kesehatan serta pendidikan masyarakatnya.[9] Hal ini sejalan dengan Paradigma pembangunan yang saat ini sedang mengalami peningkatan, dimana pertumbuhan ekonomi dilihat dari beberapa faktor yaitu mulai dari tingkat kualitas hidup penduduk setiap negara, hal ini dapat dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia nya yang diukur dari tingkat Pendidikan, tingkat Kesehatan dan daya beli masyarakat.[10] Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan,

---

[5]Badan Pusat Statistik, "PDRB," 2022, https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.

[6] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Jilid 1, Edisi 11, Terj. Agus Dharma (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 57.

[7] Yusuf Qardhawi, *Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah*, Cet. II Bairut Libanon, 1408H/1998 terjemahan Didin Hafifudin, n.d., h. 1.

[8] Sumar'in, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11.

[9] Merang, Saleh, dan Budi Suharto, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur."

[10]D. S. Mirza, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009," *Economics Development Analysis Journal* Vol.1, No.2 (2012).

dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.[11]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan rill perkapita yang disesuaikan.[12] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dibuat dan dipopulerkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul *"Human Development Report"* dan pada tahun 2010 disempurnakan dengan metode baru, dengan mengganti salah satu indikator yaitu angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah. Alasan mengapa angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka melek huruf sudah tidak efektif lagi karena angka tersebut sudah besar diseluruh Indonesia, sehingga tidak efektif lagi jika masih menggunakan angka melek huruf.[13]

IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang.[14]

Dalam rangka upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tentunya tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Lampung.

---

[11] Endah Susanti dan Nur Hidayati, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Kalimantan Timur," *Eco Build Journal* Vol. 4, No. 2 (2020): 25–34.

[12] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Op.Cit*, h. 57.

[13] Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 167.

[14] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Ketiga (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 278.

Tabel 1.1
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional
Tahun 2020

Peringkat	Provinsi	IPM
1	DKI Jakarta	80.77
2	DI Yogyakarta	79.97
3	Kalimantan Timur	76.24
4	Kep. Riau	75.59
5	Bali	75.50
6	Sulawesi Utara	72.93
7	Riau	72.71
8	Banten	72.45
9	Sumatera Barat	72.38
10	Jawa Barat	72.09
11	Aceh	71.99
12	Sulawesi Selatan	71.93
13	Jawa Tengah	71.87
14	Sumatera Utara	71.77
15	Jawa Timur	71.71
16	Kep. Bangka Belitung	71.47
17	Sulawesi Tenggara	71.45
18	Bengkulu	71.40
19	Jambi	71.29
20	Kalimantan Tengah	71.05
21	Kalimantan Selatan	70.91
22	Kalimantan Utara	70.63
23	Sumatera Selatan	70.01
24	Lampung	69.69
25	Sulawesi Tengah	69.55
26	Maluku	69.49
27	Gorontalo	68.68
28	Maluku Utara	68.49
29	Nusa Tenggara Barat	68.25

30	Kalimantan Barat	67.66
31	Sulawesi Barat	66.11
32	Nusa Tenggara Timur	65.19
33	Papua Barat	65.09
34	Papua	60.44

Sumber: BPS Tahun 2020 (data diolah)

Tabel 1.2
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pulau Sumatera Tahun 2020

Peringkat	Provinsi	IPM
1	Kep. Riau	75.59
2	Riau	72.71
3	Sumatera Barat	72.38
4	Aceh	71.99
5	Sumatera Utara	71.77
6	Kep. Bangka Belitung	71.47
7	Bengkulu	71.40
8	Jambi	71.29
9	Sumatera Selatan	70.01
10	Lampung	69.69

Sumber: BPS Tahun 2020 (data diolah)

Tabel 1.1 diatas memperlihatkan perkembangan IPM pada seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Provinsi Lampung sendiri menempati peringkat ke-24 secara nasional dengan capaian IPM sebesar 69.69. Peringkat IPM tertinggi yaitu ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan capaian IPM sebesar 80.77 dan peringkat IPM terendah yaitu ditempati oleh Provinsi Papua dengan capaian IPM sebesar 60.44. Provinsi Lampung merupakan Provinsi yang memiliki IPM terendah di Pulau Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 diatas yang memperlihatkan peringkat IPM di Pulau Sumatera pada tahun

2020. IPM tertinggi di Pulau Sumatera yaitu ditempati oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan capaian IPM sebesar 75.59.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, dari tahun 2010 hingga tahun 2020 nilai IPM Provinsi Lampung masih dibawah rata-rata IPM Nasional, hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional Tahun 2010-2020

Tahun	IPM Provinsi Lampung	IPM Nasional
2010	63.71	66.53
2011	64.20	67.09
2012	64.87	67.70
2013	65.73	68.31
2014	66.42	68.90
2015	66.95	69.55
2016	67.65	70.18
2017	68.25	70.81
2018	69.02	71.39
2019	69.57	71.92
2020	69.69	71.94

Sumber: BPS Provinsi Lampung Tahun 2020 (data diolah)

Dari tabel 1.3 diatas, terlihat bahwa IPM Provinsi lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2020 selalu mengalami kenaikan, kendati demikian nilai IPM Provinsi Lampung masih dibawah rata-rata IPM Nasional. Dimana pada tahun 2020 nilai IPM Indonesia mencapai sebesar 71.94 sedangkan nilai IPM Provinsi Lampung hanya sebesar 69.69. Pandemi Covid-19 turut membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Hal ini dapat dilihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. IPM tahun 2020 tumbuh 0,17 persen (meningkat 0,12 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kondisi pembangunan manusia di Indonesia masih belum merata di masing-masing provinsi dan capaian IPM Provinsi Lampung masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain terutama di Pulau Sumatera. Hal ini terjadi karena disebabkan perbedaan dan kesenjangan pencapaian IPM di Provinsi Lampung masih tinggi antara wilayah perkotaan dengan wilayah kabupaten terutama wilayah otonomi. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian di wilayah Lampung masih belum merata. Melihat Pembangunan IPM di Provinsi Lampung tersebut maka perlu adanya langkah-langkah konkrit dan kebijakan-kebijakan khusus berkaitan dengan sektor atau bidang yang dapat memberikan dampak efektif terhadap pembangunan manusia/modal manusia agar kualitas sumber daya manusia dapat terus bertumbuh.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara, yang diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2014, bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarkat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar

harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[15]

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.[16] Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan pendidikan dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat pemerataan pembangunan. Pembangunan yang merata akan di ikuti dengan pendapatan yang meningkat baik itu barang atau jasa yang di produksi. Hal ini dikarenakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa faktor produksi disuatu daerah.[17] Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Profesor Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output per kapita.[18] Pertumbuhan ekonomi perkapita yang dimaksud adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan

---

[15] Endah Susanti dan Nur Hidayati, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Kalimantan Timur."

[16] *Ibid*.

[17] Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi 9 (Jakarta: Erlangga, 2008).

[18] Michael P. Todaro dan C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, 2011.

output menjadikan perubahan konsumsi dalam hal tingkat daya beli masyarakat. Artinya, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pertumbuhan output perkapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat adalah salah satu indeks komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan.

Grafik 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Provinsi Lampung Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010-2020 (Rupiah)

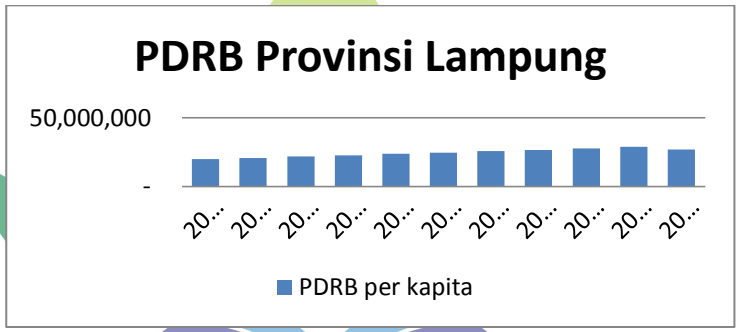

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2020, data diolah

Dari grafik 1.2 diatas terlihat bahwa PDRB per kapita Provinsi Lampung dari tahun 2010-2019 selalu mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 28.894.502. PDRB yang meningkat mununjukkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan kemajuan, ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin membaik. Hal ini karena ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat produksi juga meningkat ketika jumlah produksi meningkat maka perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga masyarakat akan memiliki pekerjaan dan akan memperoleh pendapatan yang lebih baik yang

pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Akan tetapi pada tahun 2020 PDRB per kapita Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 26.743.751. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Diberlakukannya pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mengurangi penularan virus corona membuat kegiatan usaha hampir di semua sektor lumpuh sehingga PDRB Provinsi Lampung mengalami penurunan.

Dalam Islam memandang peningkatan Sumber Daya Manusia sangatlah penting dalam kemajuan suatu negara. Pembangunan dalam islam dipandang melalui tinjauan *maqashid syariah* yang mampu bergerak dan bekerja sesuai dengan pandangan hidup ajaran islam. Menurut Ar-risuni, *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang diinginkan oleh Allah SWT berupa kemaslahatan hambanya dan terpeliharanya hamba dari *mafsadah* (kerusakan).[19]

Pembangunan manusia dalam islam bukan saja mementingkan eksistensi manusia di dunia maupun di akhirat namun juga keselamatan pada keduanya. Maka dari itu upaya pemenuhan terhadap tujuan syara' akan mendatangkan kebaikan (rahmat) dan terciptanya kesejahteraan sosial, dimana kesejahteraan tersebut berarti tidak mengabaikan keberagaman kebutuhan dasar serta keinginan individu maupun kelompok. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya[21] ayat 107 yaitu sebagai berikut:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
(Q.S An-Anbiyah[21]:107)

[19] Yusuf Qardhawi, *Fikih Maqosid Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 12.

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwa manusia adalah rahmat yaitu untuk menebarkan kebaikan di muka bumi. Dalam islam, pembangunan tidak lain adalah sebuah tujuan utama yang mengarah pada kesejahteraan umat yakni rahmat (kebaikan) bagi semesta alam. Islam adalah rahmat untuk seluruh umat guna menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan lebih bermanfaat. Kebaikan bagi manusia itu sendiri dan kebaikan bagi alam semesta maka sebuah pembangunan hendaknya berdiri atas tujuan yang selaras untuk menempatkan manusia dalam proses pembangunan yang berlangsung untuk mencapai keberhasilan dalam memelihara tujuan syara'.

Dalam prosesnya, manusia harus berdiri sebagai pelaku yang mengusahakan terwujudnya pembangunan secara menyeluruh dan sebagai pemeroleh manfaat dari adanya pembangunan tersebut. Kondisi yang demikianlah yang diharapkan dalam islam sebagai sebuah pembangunan agar kehidupan manusia menjadi penuh rahmat (kebaikan). Hal ini juga selaras dengan konsep teori ilmu pembangunan syariah yang mana Islam memandang manusia sebagai rahmat yang mempunyai dua tugas utama yang diantaranya sebagai *abdullah* (hamba allah) dan *Khalifatullahu fil ard* (wakil Allah SWT di muka bumi) yang mengemban tugas memakmurkan dan membawa rahmat kebaikan pada alam semesta.[20] Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Hud[11] ayat 61:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak

[20] Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi Dan Bisinis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, h. 114.

ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hambaNya)". (Q.S. Hud[11]:61)

Ayat tersebut dalam kitab Tafsir Al Jawahir Fi At Tafsir Al Qur'an Al Karim karya Tanthawi Jauhari memberikan penjelasan mengenai keberadaan manusia sebagai pemelihara muka bumi Allah SWT sehingga manusia telah ditakdirkan untuk mengelola segala hal yang ada di muka bumi dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan kemakmuran bersama. Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari campur tangan manusia itu sendiri untuk mewujudkannya. Namun, manusia tidak boleh dipandang sebatas alat semata untuk menciptakan pembangunan tanpa melihatnya sebagai tujuan akhir dari pembangunan tersebut. Segala hal yang mendorong pada sebuah pembangunan manusia, baik itu prestasi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan untuk menciptakan kemuliaan terhadap manusia, peningkatan terhadap kualitas manusia melalui kesehatan dan pendidikan merupakan bentuk pembenaran keterlibatan manusia dalam sebuah proses pembangunan yang bertujuan untuk kembali memberikan dampak baiknya pada manusia itu sendiri. Sehingga pembangunan lebih jauh adalah sebuah proses berkesinambungan yang tidak terputus.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun IPM Provinsi lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2020 selalu mengalami kenaikan, namun nilai IPM Provinsi Lampung masih dibawah rata-rata IPM Nasional dan capaian IPM Provinsi Lampung masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain terutama di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung menempati posisi ke-24 pada peringkat nasional dan menempati posisi terakhir di pulau Sumatera dalam pembangunan IPM. Melihat pembangunan IPM di Provinsi Lampung tersebut maka perlu adanya langkah-langkah konkrit dan kebijakan-kebijakan khusus berkaitan dengan sektor atau

bidang yang dapat memberikan dampak efektif terhadap pembangunan manusia/modal manusia agar kualitas sumber daya manusia dapat terus bertumbuh, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung Tahun 2010-2020 dalam Perpektif Ekonomi Islam."**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada dilatar belakang, terdapat beberapa point yang akan menjadi fokus pembahasan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengeluran pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dimana pengeluaran pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel X (Independen). Indikator PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2010 dan Pengeluaran Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan tahun 2010-2020.
2. Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini adalah sebagai variabel Y (dependen), pengolahan sumber datanya menggunakan data dan informasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2010-2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2010-2020?

2. Apakah Pengeluaran Pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2010-2020?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2010-2020?
4. Apakah Pengeluaran Pemerintah pada bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2010-2020 ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2010-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2010-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2010-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, bidang pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung tahun 2010-2020 ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademik, memberikan sumbangsih pengetahuan dan penilaian

terhadap pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, bidang pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung, dan juga dapat menambah literatur di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, khususnya pada Jurusan Ekonomi syariah.

2. Secara Praktis, bagi penulis merupakan sebagai sarana untuk mempraktekan teori-teori yang didapatkan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Manfaat bagi Pemerintah, sebagai bahan evaluasi dan sebagai pembanding kinerja pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian diperlukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai referensi atau acuan dan perbandingan peneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan :

1. Lintang Sania, Mohammad Balafif, dan Nurul Imamah (2021): Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan UMR terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur

   Persamaan: Terdapat pada variabel x yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

   Perbedaan: Terdapat pada variabel x lain yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu Pengeluaran Pemerintah pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel tingkat pengangguran terbuka dan UMR. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu analisis regresi data panel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan

menggunakan metode analisis data regresi linier berganda, dan penelitian yang akan dilakukan juga ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis regresi data panel menunjukkan hasil bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur, sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.[21]

2. Supaijo, Muhammad Iqbal, dan Hindun Farhany Mawaddah (2020): Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam

   Persamaan: Terdapat pada variabel x yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data regresi linier berganda. Penelitian yang dilakukan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam

   Perbedaan: Terdapat pada variabel x lain yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pertumbuhan penduduk.

   Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis data regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, dan

[21] Lintang Sania, Mohammad Balafif, dan Nurul Imamah, "Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan UMR Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur," *Bharanomics* Vol. 2, No. 1 (2021): 33–46.

Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM Kota Metro tahun 2007-2017.[22]

3. Endah Susanti dan Nur Hidayat (2020): Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur

   Persamaan: Terdapat pada variabel x yaitu Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Kesehatan dan bidang Pendidikan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan adalah metode analisis data regresi linier berganda.

   Perbedaan: Terdapat pada variabel x lain yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penelitian yang akan dilakukan juga ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

   Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang menunjukkan hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur, variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur, variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur, variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah

[22] Supaijo, Muhammad Iqbal, dan Hidun Farhany Mawaddah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Metro Tahun 2007-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *SALAM: Islamic Economics Journal* Vol. 1, No. 1 (2020): 1–22.

sektor infrastruktur secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.[23]

4. Erlangga Hadinata, Devi Valeriani, dan Suhartono (2020): Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

   Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.

   Perbedaan: Terdapat pada variabel x lain yang digunakan penelitian yang akan dilakukan yaitu Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan. Metode analisis data yang digunakan adalam penelitian terdahulu yaitu metode analisis data panel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis data regresi linier berganda dan penelitian yang akan dilakukan juga ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

   Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis data panel dengan model *fixed effect* yang menunjukkan hasil bahwa variabel Produk Domestik Bruto dan belanja pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.[24]

5. Gallyn Ditya Manggala (2019): Pengaruh Dana Desa (DD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

---

[23] Endah Susanti dan Nur Hidayati, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Kalimantan Timur," *Eco Build Journal* Vol. 4, No. 2 (2020): 25–34.

[24] Erlangga Hadinata, Devi Valeriani, dan Suhartono, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *SOROT: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 15, No. 1 (2020): 43–53.

Persamaan: pada variabel x yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perbedaan: Yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan adalah variabel x yang digunakan yaitu Dana Desa (DD), metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data regresi linier berganda dan penelitian yang akan dilakukan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menngunakan metode analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat.[25]

6. Rosnani Siregar, Hamni Fadlilah Nasution, Siti Fatimah Tanjung (2018): Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.

   Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data regresi linier berganda.

   Perbedaan: Terdapat pada variabel x lain yang digunakan penelitian yang akan dilakukan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penelitian yang akan dilakukan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

   Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh secara

[25] Gallyn Ditya Manggala, "Pengaruh Dana Desa (DD) Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)* Vol. 1, No. 1 (2019): 1–7.

parsial terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia.[26]

7. Andriana Okta Fara Diba, Moehammad Fathorrazi, dan Rafael Purtomo Somaji (2018): Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur
   Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
   Perbedaan: Terdapat pada variabel x lain yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan, sedangkan variabel x yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu Kemiskinan dan PAD. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu metode analisis regresi data panel sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu metode analisis data regresi linier berganda, dan penelitian yang akan dilakukan juga ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.
   Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi data panel menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel kemiskinan, PDRB, dan PAD memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, kemudian secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel PDRB dan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.[27]

---

[26] Rosnani Siregar, Hamni Fadlilah, dan Siti Fatimah Tanjung, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Utara," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* Vol.6, No.1 (2018): 82–105.

[27] Andriana Okta Fara Diba, Moehammad Fathorrazi, dan Rafael Purtomo Somaji, "Pengaruh Kemiskinan, PDRB, Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan

8. Muliza, T. Zulnam, dan Chenny Seftarita (2017): Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh

   Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan, bidang kesehatan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

   Perbedaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan penelitian terdahulu yaitu Tingkat Kemiskinan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan tiga variabel x yaitu pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, bidang pendidikan dan PDRB. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi data panel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis data regresi linier berganda, dan penelitian yang akan dilakukan juga ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

   Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi data panel menggunakan estimasi parameter *random effect model (REM)* menunjukkan hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, kemudian variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.[28]

9. Merang Kahang, Muhammad Saleh, dan Rachmad Budi Suharto (2016): Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur

   Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan dan Bidang

---

Manusia Di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK)* Vol. 2, No. 1 (2018): 10–19.

[28] Muliza, T. Zulham, dan Chenny Seftarita, "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol. 3, No. 1 (2017): 51–69.

Pendidikan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data regresi linier berganda.

Perbedaan: Terdapat pada variabel x lain yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Penelitian yang akan dilakukan juga ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan maka, akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur, kemudian Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.[29]

10. Evi Novitasari (2015): Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada 28 Kota/Kabupaten di Jawa Timur 2009-2013)

    Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

    Perbedaan: Terdapat pada variabel x lain yang digunakan peneliti terdahulu yaitu variabel Kemiskinan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan tiga variabel x yaitu pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, bidang pendidikan dan PDRB. Metode analisis data yang digunakan penelitian terdahulu yaitu metode analisis data regresi data panel, sedangkan dalam penelitian yang akan

[29] Merang, Saleh, dan Budi Suharto, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur."

dilakukan adalah metode analisis data regresi linier berganda, dan penelitian yang akan dilakukan juga ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model (FEM)* menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan, kemiskinan dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap IPM, dan secara parsial variabel belanja pendidikan, belanja kesehatan dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.[30]

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam memahami pembahasan yang ada pada skripsi secara menyeluruh, maka dikemukakan sistematika penulisan berupa kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi ini mencakup sampul depan *(cover)*, halaman judul, halaman abstrak, persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Pada bagaian utama skripsi ini mencakup beberapa bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

---

[30] Evi Novitasari, "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 38 Kota/Kabupaten Di Jawa Timur 2009-2013)," *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2015, 3–18.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri atas beberapa sub bab yang mencakup landasan teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis dalam penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini diuraikan mengenai tata cara peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang didapatkan serta metode yang digunakan dalam penelitian skripsi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran deskripsi data dan pembahasan hasil serta analisis penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Kesimpulan mengemukakan mengenai simpulan masalah yang terdapat pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan

pada bagian saran berisi solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir skripsi mencakup daftar pustaka dan daftar lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Digunakan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yakni derajat keberhasilan atau pencapaian dari pembangunan ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan rill perkapita yang disesuaikan.[31] IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Menurut Widodo dkk (2011), pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu Negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya.[32] IPM merupakan suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Apabila nilai IPM tinggi maka menandakan

[31] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Op.Cit*, h. 57.

[32] A. Widodo, Waridin, dan Johana M. K, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol.1, No.1 (2011).

keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Berarti terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.[33]

Indeks pembangunan manusia akan membuat seluruh pemangku kebijakan pada akhirnya mengubah fokus dari statistik ekonomi semata yang kurang menggambarkan secara keseluruhan mengenai pembangunan yang sedang terjadi menjadi sebuah ukuran lain yang lebih signifikan mengutamakan manusia di dalamnya. Indeks pembangunan manusia juga akan menjadi sebuah cerminan yang akan memberikan gambaran lebih kompleks mengenai keberhasilan suatu negara/wilayah dalam pembangunannya misalnya sekalipun dua wilayah memiliki tingkat pendapatan per orang yang sama namun menunjukkan hasil pembangunan yang berbeda. Data dan fakta inilah yang akan merangsang perdebatan tentang apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesenjangan yang terjadi pada tingkat pembangunan di wilayah/negara tertentu. Negara yang memiliki target dalam pertumbuhan ekonomi beriringan dengan konsep pembangunan manusia, ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1) Produktivitas

   Faktor penduduk dianggap sangat penting untuk menjadi tolak ukur dimana penduduk mampu meningkatkan produktivitasnya guna mendapatkan penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhannya.

2) Pemerataan

   Keadaaan dimana semua penduduk mempunyai peluang dalam mengakses sumber daya ekonomi. Harapannya mereka dapat memperoleh manfaat dan mampu menyumbang peningkatan ke arah yang lebih baik di samping meningkatkan kualitas hidupnya.

3) Kesinambungan

[33] T.H Tambunan, *Op.Cit*, h. 167.

Ketersediaan sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial harus dapat diperbahurui agar generasi yang akan datang mempunyai akses yang terhubung untuk mendapatkan sumber daya fisik, manusia dan lingkungan dengan mudah.

4) Pemberdayaan

Penduduk harus ikut serta dalam pembangunan untuk merasakan manfaat dari pembangunan. Keikutsertaan penduduk ini penting karena akan menentukan kemana arah bangsa tersebut. Maka dari itu, perlu adanya pemberdayaan penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas setiap individu dari segala kalangan masyarakat yang berpastisipasi penuh.

b. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam pengukuran nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan tiga dimensi dasar yakni kesehatan yang mencakup umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)* dan standar hidup yang layak *(decent standard of living)*. Masing-masing dari dimensi tersebut diukur menggunakan indikator-indikator tertentu. Indikator yang digunakan dalam mengukur nilai Indeks Pembangunan Manusia dalam dimensi dasar yang dikemukakan sebagai berikut:[34]

1) Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal agar penduduk negara dapat berpatisipasi dalam upaya pembangunan untuk mencapai keberhasilan. Dalam bidang kesehatan, dimensi umur panjang dan hidup sehat dinilai melalui indikator angka harapan hidup saat lahir. Angka harapan hidup saat lahir mengacu pada ratarata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Menurut standar UNDP, setidaknya 20 tahun adalah harapan hidup

[34] Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, 2021.

yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam standar ukuran minimum. Sedangkan nilai maksimumnya ditetapkan 85 tahun sebagai tujuan aspirasi mengacu pada harapan untuk keberhasilan di masa yang akan datang dari pembangunan manusia.

2) Bidang Pendidikan

Dimensi pengetahuan melalui bidang pendidikan diukur berdasarkan pada dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah memberikan gambaran jumlah tahun yang akan dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalan mengenyam pendidikan formal dengan asumsi bahwa umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Batas maksimum rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimumnya sebesar 0 tahun.

Sedangkan harapan lama sekolah diartikan sebagai lamanya sekolah dalam hitungan tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Batas maksimum harapan lama sekolah memiliki batas maksimum 18 tahun dan batas minimumnya sebesar 0 tahun. Sebagai output dari angka harapan lama sekolah akan memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai keadaan pembangunan pendidikan di wilayahnya. Hal ini dikarenakan harapan lama sekolah merupakan gambaran kesempatan pendidikan seseorang yang dimulai pada usia 7 tahun.

3) Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi, standar hidup layak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan penduduk sebagai indikasi dari adanya kondisi ekonomi yang membaik. UNDP dalam metode baru

perhitungan IPM telah mengganti indikator standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto per kapita. Mengikuti metode baru penghitungan tersebut, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan dengan kesamaan harga atau nilai daya beli. Logaritma pendapatan yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia dari dimensi standar hidup layak ini mencerminkan pentingnya pendapatan. Perkembangan agregat pendapatan tersebut dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya dapat ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB.

Terdapat nilai maksimum dan minimum dari indikator-indikator IPM yang telah ditentukan berdasarkan standar yang dibuat oleh UNDP. Indikator tersebut akan mempengaruhi nilai IPM yang diukur sehingga perubahan yang terjadi di dalamnya terkait erat dengan perubahan nilai IPM.

c. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Metode baru yang diperkenalkan oleh UNDP mengganti beberapa indikator yang dianggap kurang relevan menjadi indikator baru dalam penghitungan IPM. Selain itu, penghitungan penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam menghitung nilai IPM juga diganti menjadi rata-rata geometrik. Tujuannya agar capaian hasil penghitungan IPM yang rendah pada suatu dimensi tidak tertutup oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Pada dimensi pengetahuan indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi dasar diubah dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf dinilai sudah tidak tepat dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak lagi relevan menggambarkan kualitas pendidikan yang sebenarnya. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang

lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Indikator pada dimensi standar hidup layak juga diganti yang semula indikator PDB per kapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. PDB per kapita dinilai tidak menggambarkan pendapatan masyarakat suatu wilayah.

Indikator yang digunakan di Indonesia untuk mengukur IPM sama dengan indikator yang diperkenalkan oleh UNDP dalam metode baru, kecuali indikator dalam dimensi standar hidup layak yang menggunakan PNB per kapita. Metode baru penghitungan IPM ternyata mengakibatkan level IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama. Sehingga metode ini menyebabkan perubahan peringkat yang bergeser di beberapa daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai IPM adalah sebagai berikut:[35]

IPM = 1/3 (Indeks X1)+(Indeks X2)+(Indeks X3).....(1)

Keterangan:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

$I_{Kesehatan}$: Indeks Kesehatan

$I_{Pendidikan}$: Indeks Pendidikan

$I_{Pendapatan}$: Indeks Pendapatan Perkapita

Sedangkan untuk mengukur perkembangan IPM pada periode tertentu dengan periode sebelumnya, maka digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun dengan rumus yaitu sebagai berikut:

$$\textbf{Pertumbuhan IPM} = \frac{\textbf{IPMt} - \textbf{IPMt} - \textbf{1}}{\textbf{IPMt} - \textbf{1}} \textbf{ X 100\%}$$

[35] *Ibid.*

Keterangan:
IPMt : IPM pada tahun t
IPMt-1 : IPM tertentu pada tahun sebelumnya

Masing-masing dari komponen terlebih dahulu secara terpisah dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan analisa biasanya indeks tersebut dikalikan 100. Menghitung indeks masing-masing komponen dalam IPM digunakan batasan maksimum dan minimum seperti tabel di berikut ini:

Tabel 2.1
Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM

Komponen IPM	Minimum	Maximum	Keterangan
Angka Harapan Hidup (Tahun)	20	85	Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	0	18	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	0	15	Standar UNDP
Daya Beli (Rupiah)	1.007.436* (RP)	25.572.352** (RP)	Menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Catatan :

- Nilai maksimum dikatakan pencapain yang baik apabila menyentuh angka tersebut.
- Apa bila nilai rata-rata tidak menyentuh angka yang di tentukan maka kurang dari standar.
- (*) Daya beli minimum mengacu pada garis kemiskinan terendah kabupaten (data empiris).
- (**) Daya beli mamksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJMN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung setiap komponen tersebut, yaitu sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan : $I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$

Dimensi Pendidikan : $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$

$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$

$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$

Dimensi Pengeluaran : $\frac{\text{In } (pengeluaran) - \text{In } (pengeluaran_{min})}{\text{In } (pengeluaran_{maks}) - \text{In } (pengeluaran_{min})}$

Setelah semua komponen dihitung, rumus umum yang digunakan adalah menghitung indeks pembangunan manusia sebagai rata-rata geometrik dari masing-masing nilai. Setelah melakukan perhitungan maka akan dihasilkan angka berupa skor berkisar antara 0-100.[36] UNDP membagi tingkataan status pembangunan manusia tersebut kedalam empat golongan yang dapat dilihat dalam tabel berikut, yaitu:

Tabel 2.2

Peringkat Kinerja Pembangunan Manusia

No	Status	Keterangan
1	Sangat Tinggi	IPM ≥ 80
2	Tinggi	70 ≤ IPM < 70
3	Sedang	60 ≤ IPM < 70
4	Rendah	IPM < 60

Sumber : Badan Pusat Statistik

[36] *Ibid.*

d. Tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1) Membentuk sebuah indikator yang mengukur dimensi utama sebuah pembangunan manusia dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
2) Memberikan gambaran asumsi mengenai peringkat/level pembangunan yang berlangsung di suatu wilayah/negara sehingga dapat menjadi tolak ukur yang dapat digunakan untuk menemukan strategi upaya perbaikan kualitas pembangunan antar wilayah satu sama lain.
3) Membentuk sebuah indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar.
4) Membangun suatu nilai pengukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.[37]

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembangunan manusia dan kesejahteraan manusia berdampingan memiliki tempat penting dalam konsep pembangunan Islam, tujuannya tidak lain ialah berdasarkan pada maslahah.[38] Dalam islam, konsep pembangunan harus menjadi sebuah proses multidimensi yang menciptakan perubahan struktur sosial. Menurut Al-Ghazali prioritas utama pembangunan manusia tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar pokok tujuan syara' dalam islam yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[39] Namun, dalam upaya mencapai *falah* (kemuliaan dalam hidup) manusia pasti menghadapi permasalahan yang akan saling berkaitan. Permasalahan memicu ketidakmampuan, keterbatasan, dan kelemahan manusia dalam mencapai tujuan syara' sehingga mengancam eksistensi hidupnya.

---

[37] *Ibid*.

[38] Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Edisi Revisi (Rajawali Pers, 2016), h. 15.

[39] P3EI, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 5.

Pembangunan manusia dalam islam bukan saja mementingkan eksistensi manusia di dunia maupun di akhirat namun juga keselamatan pada keduanya. Maka dari itu upaya pemenuhan terhadap tujuan syara' akan mendatangkan kebaikan (rahmat) dan terciptanya kesejahteraan sosial, dimana kesejahteraan tersebut berarti tidak mengabaikan keberagaman kebutuhan dasar serta keinginan individu maupun kelompok. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya[21] ayat 107 yaitu sebagai berikut:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S An-Anbiyah[21]:107)

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwa manusia adalah rahmat yaitu untuk menebarkan kebaikan di muka bumi. Dalam islam, pembangunan tidak lain adalah sebuah tujuan utama yang mengarah pada kesejahteraan umat yakni rahmat (kebaikan) bagi semesta alam. Islam adalah rahmat untuk seluruh umat guna menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan lebih bermanfaat, tidak miskin dan tidak juga berada dalam keadaan menderita. Kebaikan bagi manusia itu sendiri dan kebaikan bagi alam semesta maka sebuah pembangunan hendaknya berdiri atas tujuan yang selaras untuk menempatkan manusia dalam proses pembangunan yang berlangsung untuk mencapai keberhasilan dalam memelihara tujuan syara'.

Dalam prosesnya, manusia harus berdiri sebagai pelaku yang mengusahakan terwujudnya pembangunan secara menyeluruh dan sebagai pemeroleh manfaat dari adanya pembangunan tersebut. Kondisi yang demikianlah yang diharapkan dalam islam sebagai sebuah pembangunan agar kehidupan manusia menjadi penuh rahmat (kebaikan). Hal ini juga selaras dengan konsep teori ilmu pembangunan syariah yang mana Islam memandang

manusia sebagai rahmat yang mempunyai dua tugas utama yang diantaranya sebagai *abdullah* (hamba allah) dan *Khalifatullahu fil ard* (wakil Allah SWT di muka bumi) yang mengemban tugas memakmurkan dan membawa rahmat kebaikan pada alam semesta.[40] Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Hud[11] ayat 61:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hambaNya)". (Q.S. Hud[11]:61)

Ayat tersebut dalam kitab Tafsir Al Jawahir Fi At Tafsir Al Qur'an Al Karim karya Tanthawi Jauhari memberikan penjelasan mengenai keberadaan manusia sebagai pemelihara muka bumi Allah SWT sehingga manusia telah ditakdirkan untuk mengelola segala hal yang ada di muka bumi dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan kemakmuran bersama. Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari campur tangan manusia itu sendiri untuk mewujudkannya. Namun, manusia tidak boleh dipandang sebatas alat semata untuk menciptakan pembangunan tanpa melihatnya sebagai tujuan akhir dari

[40] Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi Dan Bisinis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 114.

pembangunan tersebut. Segala hal yang mendorong pada sebuah pembangunan manusia, baik itu prestasi terhadap pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan untuk menciptakan kemuliaan terhadap manusia, peningkatan terhadap kualitas manusia melalui kesehatan dan pendidikan merupakan bentuk pembenaran keterlibatan manusia dalam sebuah proses pembangunan yang bertujuan untuk kembali memberikan dampak baiknya pada manusia itu sendiri. Sehingga pembangunan lebih jauh adalah sebuah proses berkesinambungan yang tidak terputus.

2. Pengeluaran Pemerintah

a. Definisi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).[41]

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.[42] Dalam pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, *government expenditure* atau *government*

[41] Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, h. 215.

[42] Merang, Saleh, dan Budi Suharto, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur."

purchase meliputi semua pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya.[43]

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai konsumsi pemerintah, kegiatan-kegiatan dan pengeluaran lainnya guna tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b. Teori Pengeluaran Pemerintah

1) Teori Wagner

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab dimaksud adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi pemerintah. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah *(organis theory of the state)* yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

2) Teori WW Rostow dan RA musgrave

WW Rostow dan RA musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan

[43] Marzuki Ilyas, *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989).

terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave seperti halnya Wagner, menandai pendapatannya berdasarkan pengamatan pembangunan ekonom dibanyak negara. [44]

3) Teori Peacok dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar

pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara.

c. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan bertumpu pada kesehatan yang baik. Menurut Notoatmodjo, mutu manusia dilihat dari sisi kesehatannya, karena kesehatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, dengan kata lain kesehatan adalah salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.[45]

Menurut teori dalam buku Michael P. Todaro dengan judul Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memberikan kontribusi kepada indeks pembangunan manusia yaitu modal manusia. Modal manusia disini merupakan hasil dari investasi yang diberikan pemerintah untuk kesehatan

[44]Soediyono, *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, (Yogyakarta: Liberty,1989).

[45] S. Notoatmodjo, *Pendidikan Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

dimana modal kesehatan yang baik dapat meningkatkan pembangunan manusia yang baik.[46]

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan merupakan salah satu cara pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat. Perbaikan layanan kesehatan masyarakat merupakan bentuk investasi pada sumber daya manusia untuk dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pengeluaran Pemerintah pada bidang Kesehatan diatur dalam Undang-undang. Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.[47] Anggaran pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan hendaklah mampu menjamin hak kesehatan masyarakat dengan melakukan pelayanan kesehatan yang merata, memadai, bermutu serta terjangkau bagi kalangan masyarakat. Dengan terpenuhinya kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat tentu akan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk lebih produktif serta dapat meningkatkan pendaptannya. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan digunakan untuk melihat capaiannya terhadap dimensi IPM yang pertama, yaitu hidup sehat dan umur panjang.

Indikator pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan adalah alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Alokasi dana pengeluaran pemerintah bidang kesehatan diantaranya digunakan untuk :

1) Pembangunan dan peningkatan/revitalisasi fasilitas kesehatan serta pemeliharaan sarana dan prasaran kesehatan

[46] Michael P. Todaro, *Opcit*.
[47] UU No 36 tahun 2009

Program pembangunan rumah sakit serta revitalisasi puskesmas dan posyandu mendukung upaya preventif untuk terus menjaga kesehatan masyarakat. Anggaran yang digunakan tersebut berdampak pada peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan mempertinggi usia harapan hidup masyarakat Lampung.

2) Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Bantun Iuran Kesehatan Masyarakat

Anggaran kesehatan digunakan untuk membiayai penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan layanan JKN (Jaminan Kesehatan Negara) seperti kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan), pembangunan rumah sakit dan pendorongan pola hidup sehat. Ketika akses terhadap kesehatan, seperti JKN (Jaminan Kesehatan Negara) telah terpenuhi oleh subsidi pemerintah maka akan mampu membuat setiap individunya hidup layak dan umur panjang sesuai dengan dimensi pertama IPM.Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBN dan APBD per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung terus meningkat. Di tahun 2018, peserta PBI APBN berjumlah 3.39 juta orang dan PBI APBD (Kab/Kota/Sharing Provinsi) berjumlah 404 ribu orang. Sementara di Tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi 3.83 juta orang dan 874 ribu orang. Anggaran kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD) per kapita pada tahun 2020 secara provinsi sebesar Rp344.589,39 per orang. Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota maka Kota Metro merupakan kota dengan aggaran per kapita tertinggi yaitu sebesar Rp. 1.982.010,8 per kapita.

3) Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Program gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) juga mendorong naiknya usia harapan hidup

masyarakat. Belanja kesehatan tidak hanya diarahkan untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat diantaranya melalui program penyehatan lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.

Dalam Islam konsep sehat yaitu mencakup tiga pilar, seperti firman Allah dalam surah As-Sajdah[32] ayat 9, sebagai berikut:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

"Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur." (QS. As-Sajdah[32]: 9)

Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati tujuannya adalah agar manusia dapat mendengar, melihat dan memahami kebenaran dan petunjuk. Karena sejatinya saat manusia dilahirkan ke dunia mereka tidak mengerti apa-apa dan dengan pendengaran, penglihatan dan hati yang sehat maka manusia dapat memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bekal hidupnya di dunia dan akhirat kelak.

d. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, baik itu pendidikan formal atau informal. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang wajib disediakan oleh pemerintah. Menurut Michael P. Todaro, produktifitas suatu negara dapat meningkat jika pemerintah dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar

masyarakatnya, dalam hal ini yaitu pendidikan.[48] Michael P. Todaro juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memberikan kontribusi kepada indeks pembangunan manusia yaitu modal manusia. Modal disini merupakan hasil dari investasi yang diberikan pemerintah untuk pendidikan dimana modal pendidikan yang baik akan meningkatkan pembangunan manusia yang baik.[49] Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan merupakan wujud dari investasi pemerintah guna meningkatkan kualitas pada sumber daya manusia. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan sebagai mana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.[50] Dengan adanya pendidikan mayarakat akan memperoleh ilmu pengetahuan, kecakapan dan juga keterampilan. Dimana hal tersebut merupakan faktor dasar yang kita butuhkan untuk dapat bersaing dengan negara maju.

Menurut Hera Susanti dkk, bahwa pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat mengakumulasikan modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendidikan melalui pengeluaran pemerintah di suatu negara menjadi sangat penting bagi pembangunan negara

[48] Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
[49] Michael P. Todaro, *Op.Cit*.
[50] UU No. 20 tahun 2003

tersebut. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan digunakan untuk melihat capaiannya terhadap dimensi IPM yang kedua, yaitu dimensi pengetahuan.

Indikator pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan adalah alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang pendidikan. Alokasi dana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan diantaranya digunakan untuk :

1) Pembangunan sarana dan prasarana/gedung sekolah
   Anggaran belanja digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah serta sarana dan prasaran yang mendukung untuk meningkatkan fasilitas pendidikan masyarakat.
2) Peningkatan pendidikan vokasi bidang industri, penelitian dan pengembangan pendidikan
   Searah dengan kebijakan Presiden RI Jokowi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek), terus mendorong tercapainya visi nasional dalam mewujudkan SDM unggul, melalui peningkatan mutu pembelajaran vokasi di bidang industri kreatif. Upaya tersebut diwujudkan dengan meresmikan Pendidikan Tinggi Vokasi Multimedia Nusantara Polytechnic (MNP).
3) Bantuan pendidikan untuk siswa (beasiswa) dan lembaga pendidikan serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
   Ketika masyarakat mendapat Bantuan Operasional Sekolah, sebagai contohnya wajib belajar 12 tahun, maka masyarakat dapat mengenyam pendidikan minimal hingga 12 tahun (menamatkan SMA). Suksesnya program wajar 12 tahun turut meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung yang merupakan komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan.

Pendidikan dalam islam sangatlah penting dan Allah telah memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Mujadillah[58] ayat 11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Mujadilah[58]: 11)[51]

Dalam ayat diatas Allah SWT mempertegas bahwa ilmu lah yang akan menolong manusia selama di dunia, ilmu juga yang akan meningkatkan derajat manusia dimuka bumi dan menghilangkan segala kesulitan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini.

e. Pengeluaran Pemerintah dan Kebijakan Publik Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pemerintah dalam Islam adalah sebagai wakil masyarakat yang diserahi amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan harta tersebut hanya bersifat sebagai "uang belanja".

[51] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 543.

Sesungguhnya, keseluruhan harta secara umum adalah hak milik masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan atau kemaslahatan masyarakat.[52] Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, peran pemeritah dalam Islam salah satunya adalah mengelola keuangan publik agar diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara bagi kepentingan umat, yaitu untuk menggunakan keuangan tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketaqwaan masyarakat. Jadi, sebagian besar anggaran pemerintah akan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim.

Ada dua jenis kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

1) Mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi baik dalam kelompok sendiri, maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya tanpa dibiayai oleh baitul mal.
2) Kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah SAW dan empat khalifah dengan mengeluarkan dana *baitul mal*.[53]

Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk mengembangkan peran yang dimainkan setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam.

1) Penyebaran Islam.
2) Pendidikan dan kebudayaan.
3) Pengembangan ilmu pengetahuan.
4) Pengembangan infrastruktur .
5) Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan.
6) Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

---

[52] Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 7.

[53] A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, h. 275.

Enam prinsip umum berikut dapat dijabarkan untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik (peran pemerintah sebagai pembeli besar).

1) Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan masyarakat.
2) Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan diatas penyediaan rasa tentram.
3) Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus lebih diutamakan diatas kepentingan minoritas yang lebih sedikit.
4) Pengorbanan atau kerugian individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan pengorbanan ataupun kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan menjatuhkan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5) Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
6) Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak dapat terpenuhi merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannnya.

f. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1) Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktifitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Tidak hanya bagi usia dewasa namun juga anak-anak. Sebagai negara berkembang yang sangat rentan akan masalah

kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah.

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

2) Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber daya manusia bagi suatu bangsa merupakan salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa tersebut. Untuk itu pendidikan formal merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat yang wajib disediakan oleh negara. Tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan, norma-norma, nilai luhur dan cita-cita pun bisa sekaligus tertanam, yang ikut andil dalam pembangunan bangsa. Hal ini tak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menghadapi perkembangan zaman. Sebab

kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakat.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto *(gross value added)* yang timbul dari seluruh sektor perekonomian pada suatu wilayah pada tingkat regional pada suatu periode tertentu. Nilai tambah bruto yang dimaksud adalah nilai produksi (output)

dikurangi dengan biaya antara *(intermediate cost).*[54] Biaya antara adalah biaya pembelian atau biaya perolehan dari sektor lain yang telah dihitung sebagai produksi di sektor tersebut atau berasal dari impor yang telah dihitung sebagai nilai produksi di negara pengekspor.[55]

Menurut Michael P. Todaro, PDRB adalah Nilai output akhir yang dihasilkan dalam wilayah dengan batas geografis tertentu.[56] Total output tersebut merupakan barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah, baik yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut.[57] Sehingga segala sesuatu yang dihasilkan di dalam suatu daerah dinyatakan sebagai PDRB daerah tersebut.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domesttik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.[58] Nilai tambah tersebut merupakan nilai bersih dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode.

Jadi PDRB merupakan nilai kesuluruhan produk yang dihasilkan berdasarkan batas wilayah geografis oleh penduduk daerah tersebut maupun penduduk daerah lain yang bermukim di daerah tersebut dalam suatu waktu. PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam dan faktor produksi daerah yang dimilikinya.

---

[54] Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi*, Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 18.

[55] *Ibid*, h. 14.

[56] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, Edisi 11, Terj. Devri Barnadi Putra (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 215.

[57] *Op.Cit*, *Pembangunan Ekonomi*, 2011, h. 17 dan 53.

[58] Badan Pusat Statistik, "PDRB."

b. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1) UNDP menyatakan bahwa kualitas pembangunan manusia dapat mengalami peningkatan apabila didukung oleh PDRB yang tinggi dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi akan efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia. Produk domestik regional bruto menunjukan pertumbuhan ekonomi karena apabila pertumbuhan ekonomi tinggi merupakan syarat bagi terciptanya pembangunan manusia. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi berati menunjukan peningkatan produktifitas dan ketika terjadi peningkatan produktifitas maka terjadi peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Ketika pendapatan yang diterima oleh masyarakat tinggi maka masyarakat tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan akan tercipta. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan memiliki pengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya kreativitas dan produktivitas maka masyarakat dapat mengelola sumber daya yang ada yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas yang dihasilkan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Teori yang dikemukakan oleh Profesor Kuznet menyatakan bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output per kapita. Pertumbuhan ekonomi perkapita yang dimaksud adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan konsumsi dalam hal tingkat daya beli masyarakat. Artinya, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan pertumbuhan output perkapita dan

merubah pola konsumsi dalam hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat adalah salah satu indeks komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan.

c. Indikator Pengukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diukur menggunakan
cara berikut:

1) PDRB atas dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku disebut juga PDRB nominal, merupakan nilai produk dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku ketika produk tersebut dihasilkan.[59] PDRB ini terjadi sebagai akibat adanya kenaikan jumlah dan harga produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi PDRB atas dasar harga berlaku ini merupakan produksi barang dan jasa yang dinilai pada harga saat ini. PDRB ini dapat dihitung melalui persamaan berikut:

PDRB Nominal = Jumlah Produk × Harga Produk terkini

2) PDRB atas dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan disebut juga PDRB riil, yaitu produksi barang dan jasa yang dinilai pada harga tetap. Penilaian menggunakan harga pada suatu tahun yang dijadikan sebagai tahun basis.[60] PDRB ini terjadi karena kenaikan volume produk tanpa

[59] *Ibid.*

[60] N. Gregory Mankiw, Euston Quah, dan Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Asia, Terj. Biro Bhasa Alkemis (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 14.

memerhatikan faktor perubahan harga. Dengan kata lain, harga pada tahun basislah yang menjadi dasar perbandingan kuantitas pada tahun-tahun berbeda. PDRB ini
dapat dihitung melalui persamaan berikut:

PDRB Riil = Harga produk pada tahun basis × produksi tahun χ

PDRB nominal menggunakan harga yang berlaku saat ini untuk menilai barang dan jasa yang diproduksi, sedangkan PDRB riil menggunakan harga tahun basis. Maka untuk memonitor harga rata-rata dalam perekonomian digunakanlah deflator PDRB. Deflator PDRB merupakan salah satu dari bentuk indeks harga. Deflator PDRB ini merupakan angka penyesuaian nilai PDRB berdasarkan tahun tahun dasar.[61] Jadi deflator PDRB hanya mencerminkan apa yang terjadi dengan harga bukan dengan jumlah.

$$\text{Deflator PDRB} = \frac{PDRB\ Nominal}{PDRB\ Riil} \times 100$$

PDRB Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil perhitungan PDRB atas harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah.

$$\text{PDRB Per Kapita} = \frac{PDRB\ Rill}{Jumlah\ Pendudukan\ Suatu\ Wilayah\ Pada\ Periode\ tertentu}$$

[61] Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, Edisi Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 36.

d. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

1) Metode Langsung

Metode ini adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri.[62] Metode ini dapat dilakukan dengan tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a) Pendekatan Produksi

Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan lapangan usaha. Pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor ekonomi selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun.[63] Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik. Jadi dengan pendekatan ini dapat memperlihatkan peranan tiap sektor lapangan terhadap perekonomian daerah tersebut.

Menurut BPS, klasifikasi lapangan usaha yang termasuk dalam metode ini mencakup 17 jenis yaitu:[64]

(1) Pertanian, kehutanan dan perikanan
(2) Pertambangan dan penggalian
(3) Industri pengolahan
(4) Pengadaan listrik dan gas

---

[62] Robinson Tarigan, *Op.Cit*, h. 23.
[63] Asfia Murni, *Op.Cit*, h. 40.
[64] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2016-2020*, 2020.

(5) Pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang
(6) Konstruksi
(7) Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor
(8) Transportasi dan pergudangan
(9) Penyediaan akomodasi dan makan minum
(10) Informasi dan komunikasi
(11) Jasa keuangan dan asuransi
(12) Real estat
(13) Jasa perusahaan
(14) Administrasi pemerintahan
(15) Pertahanan dan jaminan sosial wajib
(16) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
(17) Jasa lainnya

b) Pendektan Pendapatan

Dalam pendekatan ini, PDRB dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan balas jasa *(income)* yang diperoleh pemilik faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.[65] Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi sering kali tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.[66]

c) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini dihitung dengan menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah. Pendekatan ini juga menghitung apa yang diproduksi di wilayah tersebut namun hanya yang menjadi konsumsi penggunaan akhir. Sehingga dengan pendekatan ini tidak

[65] Asfia Murni, *Op.Cit*, h. 42.
[66] Robinson Tarigan, *Op.Cit*, h. 24.

menimbulkan perhitungan ganda karena apa yang telah dikonsumsi sebagai konsumsi akhir tidak akan lagi dikonsumsi seseorang atau lembaga lain.[67]

Menurut BPS, perhitungan PDRB dengan pendekatan ini mencakup sembilan klasifikasi, yaitu:[68]

(1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga
(2) Pengeluaran konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga)
(3) Pengeluaran konsumsi pemerintah
(4) Pembentukan modal tetap bruto
(5) Perubahan inventori
(6) Ekspor barang dan jasa
(7) Impor barang dan jasa

2) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto (PDB) menggunakan data dari sumber nasional yang dialokasikan ke masing-masing bagian wilayah atau daerah menggunakan alokator tertentu. Alokator tersebut diantaranya:

a) Nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan
b) Jumlah produksi fisik
c) Tenaga kerja
d) Penduduk
e) Alokator tidak langsung lainnya.

Jadi dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator di atas dapat diperhitungkan persentase bagian masingmasing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor atau subsektor. Metode ini digunakan untuk kegiatan usaha yang lokasinya ada di

---

[67] *Ibid*, h. 24-25.

[68] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2016-2020*.

beberapa wilayah sedangkan pencatatan lengkapnya hanya ada di kantor pusat.[69]

e. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1) PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar begitu juga sebaliknya.
2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3) Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah.
4) Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
5) PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri maupun luar wilayah.
6) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.[70]

f. Produk Domestik Regional Bruto dalam Perspektif Ekonomi Islam

---

[69] Robinson Tarigan, *Op.Cit*, h. 25-26.

[70] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2016-2020*.

Ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai *(value)* dalam analisa ekonomi, misalnya menjadikan nilai *(value)* suatu barang dan jasa yang dihasilkan sebagai dasar penelitian ekonomi.[71] Fluktuasi nilai tambah dalam PDB atau PDRB menjadi indikator kesejahteraan dan keberhasilan ekonomi suatu negara atau daerah. Namun dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi indikator kesejahteraan adalah tercapainya *falah* dalam segala kegiatan perekonomian.

Selain peningkatan PDRB, tingginya angka pendapatan per kapita juga sering dijadikan tolak ukur kesejahteraan. Namun hal tersebut bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan. Ini hanya merupakan *necessary condition* dalam isu kesejahteraan dan bukan *sufficient condition*. Islam dalam arti sistem ekonomi *(nidhom al-iqtishad)* merupakan sebuah sistem yang dapat mengantarkan umat manusia pada *real welfare* atau *falah*, kesejahteraan yang sebenarnya. *Falah* mengacu pada konsep Islam tentang manusia itu sendiri.[72] Sehingga tidak hanya kesejahteraan dunia saja yang mencakup jasadiyah dan ruhaniah saja yang akan didapat tetapi juga kebaikan akhirat sebagaimana dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah[2] ayat 201.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliiharalah kami dari siksa neraka." (Q.S. Al-Baqarah[2]: 201)

---

[71] Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 84.

[72] Nurul Huda, Hadi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 28.

Untuk mencapai *falah* dalam perekonomian, maka perlu adanya suatu motor penggerak yakni salah satunya adalah sektor produksi, baik barang maupun jasa. Sektor produksi menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Produksi dalam Islam diartikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas.[73] Maka dari itu, selain memasukkan unsur falah dalam menganilisis kesejahteraan, juga penting memasukkan instrumen lain seperti zakat, wakaf dan sedekah dalam perhitungannya.[74] Jadi PDRB dalam perspektif ekonomi Islam dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan tidak hanya dalam bentuk fisik semata, namun juga ada perbaikan dalam moralitas masyarakat suatu daerah.

g. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Produk domestik regional bruto menunjukan pertumbuhan ekonomi karena apabila pertumbuhan ekonomi tinggi merupakan syarat bagi terciptanya pembangunan manusia. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi berati menunjukan peningkatan produktifitas dan ketika terjadi peningkatan produktifitas maka terjadi peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Ketika pendapatan yang diterima oleh masyarakat tinggi maka masyarakat tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan akan tercipta. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan memiliki pengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya kreativitas

[73] Khaf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, h. 59.

[74] Nurul Huda, Hadi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wiliasih, *Loc.Cit*.

dan produktivitas maka masyarakat dapat mengelola sumber daya yang ada yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas yang dihasilkan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[75]

4. Kerangka Berfikir

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan-tujuan penelitian, maka hubungan antar variabel dinyatakan dalam kerangka berfikir. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

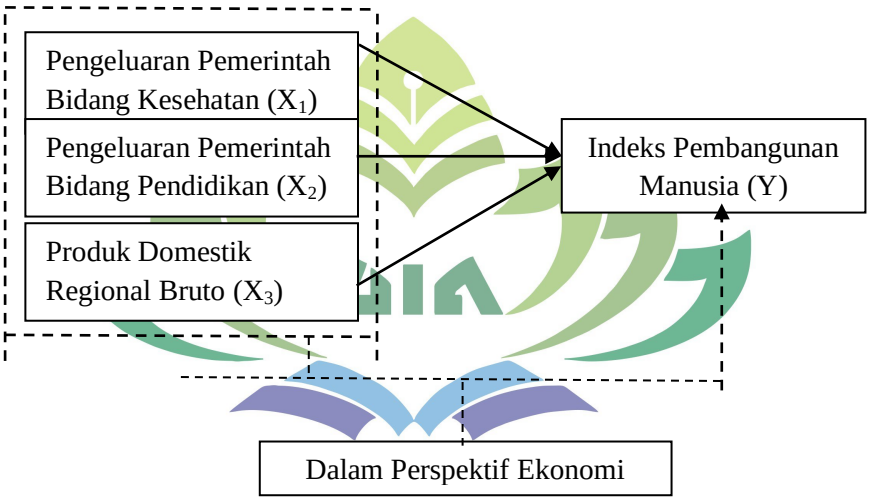

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Keterangan:

———— = Berpengaruh Secara Parsial

- - - - - - - - - - - - = Berpengaruh Secara Simultan

[75] M. Irfan Pratama, "Analisis Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2011-2016," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia 2018).

B. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

Teori dalam buku Michael P. Todaro dengan judul Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memberikan kontribusi kepada indeks pembangunan manusia yaitu modal manusia. Modal manusia disini merupakan hasil dari investasi yang diberikan pemerintah untuk kesehatan dimana modal kesehatan yang baik dapat meningkatkan pembangunan manusia yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endah Susanti dan Nur Hidayat (2020) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tersebut, maka hipotesis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0: Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan
terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

H_1: Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

Teori dalam buku Michael P. Todaro dengan judul "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga" yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memberikan kontribusi kepada indeks pembangunan manusia yaitu modal manusia. Modal disini merupakan hasil dari investasi yang diberikan pemerintah untuk pendidikan dimana modal pendidikan yang baik akan meningkatkan pembangunan manusia yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merang Kahang, Muhammad Saleh, dan Rachmad Budi Suharto (2016) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tersebut, maka hipotesis keempat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0: Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

H_2: Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

c. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erlangga Hadinata, Devi Valeriani, dan Suhartono (2020) menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Sesuai dengan ungkapan UNDP, bahwa kualitas

pembangunan manusia dapat mengalami peningkatan apabila didukung oleh PDRB yang tinggi dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi akan efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori yang telah dijelaskan tersenut, maka hipotesis ketiga yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0: Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

H_3: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

d. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, dan Produk Domestik Regional Bruto secara simultan (bersama-sama) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Novitasari (2015) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_1), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_2) dan Produk Domestik Regional Bruto (X_3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi islam menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa melalui peningkatan pembangunan manusia itu sendiri. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi indikator kesejahteraan adalah tercapainya *falah* dalam segala kegiatan perekonomian. Selain itu, peningkatan PDRB dan tingginya angka pendapatan per kapita juga sering dijadikan tolak ukur kesejahteraan. Namun hal tersebut bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan. *Falah* mengacu pada konsep Islam

tentang manusia itu sendiri.[76] Sehingga tidak hanya kesejahteraan dunia saja yang akan didapat, tetapi juga kebaikan akhirat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori yang telah dijelaskan tersebut, maka hipotesis keempat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0: Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, dan Produk Domestik Regional Bruto secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

H_4: Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, dan Produk Domestik Regional Bruto secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

[76] Nurul Huda, Hadi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 28.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islami*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, 2021.

———. "PDRB," 2022. https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.

———. "Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidkan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial)," 2022. https://www.bps.go.id.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2016-2020*, 2020.

Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY. *Ekonomi Dan Bisinis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Fara Diba, Andriana Okta, Moehammad Fathorrazi, and Rafael Purtomo Somaji. "Pengaruh Kemiskinan, PDRB, Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK)* Vol. 2, No. 1 (2018): 10–19.

Hadinata, Erlangga, Devi Valeriani, and Suhartono. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *SOROT: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 15, No. 1 (2020): 43–53.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Huda, Nurul, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, and Ranti Wiliasih. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2018.

Ilyas, Marzuki. *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Kencana Alumni, 1998.

Khaf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995.

Lubis, Suhrawardi K, and Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.

Manggala, Gallyn Ditya. "Pengaruh Dana Desa (DD) Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)* Vol. 1, No. 1 (2019): 1–7.

Mankiw, N. Gregory, Euston Quah, and Peter Wilson. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Asia, Terj. Biro Bhasa Alkemis. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Merang, Kahang, Muhammad Saleh, and Rachmad Budi Suharto. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* Vol.18, No.2 (2016): 130–40.

Mirza, D. S. "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009." *Economics Development Analysis Journal* Vol.1, No.2 (2012).

Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muliza, T. Zulham, and Chenny Seftarita. "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol. 3, No. 1 (2017): 51–69.

Murni, Asfia. *Ekonomika Makro*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Novitasari, Evi. "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Kemiskinan Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 38 Kota/Kabupaten Di Jawa Timur 2009-2013)." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2015, 3–18.

P. Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi 9. Jakarta: Erlangga, 2008.

P. Todaro, Michael, and Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1, Edisi 11, Terj. Agus Dharma. Jakarta: Erlangga, 2011.

———. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 2, Edisi 11, Terj. Devri Barnadi Putra. Jakarta: Erlangga, 2018.

P3EI. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Pratama, M. Irfan. "Analisis Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2011-2016," Skripsi, Universitas Islam Indonesia 2018.

Qardhawi, Yusuf. *Fikih Maqosid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

———. *Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah*. Cet. II Bairut Libanon, 1408H/1998 terjemahan Didin Hafifudin.

Sania, Lintang, Mohammad Balafif, and Nurul Imamah. "Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan UMR Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur." *Bharanomics* Vol. 2, No. 1 (2021): 33–46.

Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. Ke-6. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Siregar, Rosnani, Hamni Fadlilah, and Siti Fatimah Tanjung. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Utara." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* Vol.6, No.1 (2018): 82–105.

Subanti, Sri, and Arif Rahman Hakim. *Ekonometri*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Sudjana. *Metode Statistik*. Bandung: PT. Tarsito, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian BisnisPendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

———. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2015.

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sumar'in. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Supaijo, Muhammad Iqbal, and Hidun Farhany Mawaddah. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Metro Tahun 2007-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *SALAM: Islamic Economics Journal* Vol. 1, No. 1 (2020): 1–22.

Susanti, Endah, and Nur Hidayati. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Kalimantan Timur." *Eco Build Journal* Vol. 4, No. 2 (2020): 25–34.

Syauqi Beik, Irfan. *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*. Edisi Revisi. Rajawali Pers, 2016.

Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

T.H Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Widarjono, Agus. *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2005.

———. *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2007.

Widodo, A., Waridin, and Johana M. K. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol.1, No.1 (2011).

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.